

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu pemukiman warga yang dipimpin oleh kepala desa sebagai pemimpinnya, yang dimana pimpinan desa memiliki hak untuk mengelola dan mengatur masyarakatnya sesuai dengan tradisi yang masih ada. Desa sebagai bentuk pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan warga menjadi titik perhatian utama dalam pembangunan negara, ini disebabkan karena sebagian wilayah di Indonesia terdapat di daerah pedesaan. Desa merupakan bentuk pemerintahan yang berada di tingkat paling dasar, di mana melalui pemerintahan desa, komunitas setempat bisa mengatur dan mengelola dirinya sendiri, termasuk menangani konflik yang muncul di dalam masyarakat.

Banyak pembangunan desa saat ini yang tidak terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat setempat bingung dengan dana pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan desa. Dana desa berasal dari APBN dan ditransfer ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah. Dana tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan, dan pengembangan potensi masyarakat. Proses penyelenggaraan otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa, dan pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini mengatur sejumlah hal, termasuk hak dan kewajiban desa dan

masyarakat, pemilihan kepala desa, pembangunan desa, dan usaha milik desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengakui serta mempertahankan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Penganggaran, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban pelaporan dana desa diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, pemerintahan desa dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk meningkatkan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.¹ Berikut ini adalah tujuan dana desa, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014: (1) meningkatkan pelayanan publik desa, (2) mengurangi kemiskinan, (3) mengembangkan ekonomi desa, (4) menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Ekonomi politik, dalam konteks desa, menyoroti bagaimana hubungan antara politik dan ekonomi memengaruhi kehidupan masyarakat desa. Ini mencakup bagaimana kebijakan pemerintah, seperti alokasi anggaran atau program pembangunan, berdampak pada perekonomian lokal, serta bagaimana aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa dapat disalurkan melalui proses politik untuk

¹ Peri Ilham, La Bilu, dan Muh Nasir, “Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Politik Anggaran Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan),” *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi* 2, no. April (2024): 38–48.

mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Dalam konteks desa, interaksi ini menjadi lebih penting karena desa seringkali menjadi fokus utama dari kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah dan pusat seringkali memiliki program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan desa, dan bagaimana program ini berjalan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di desa tersebut.

Pembangunan memegang peranan penting dalam pemanfaatan pendapatan desa. Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan Indonesia yang digunakan dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, desa memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan tugas untuk mengendalikan dan mengawasi kepentingan penduduknya sendiri. Desa membutuhkan sumber pendapatan daerah untuk mewujudkannya. Marbun mendefinisikan pembangunan desa sebagai semua kegiatan desa yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dengan menumbuhkan rasa saling membantu dan kemandirian masyarakat.²

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) menyediakan forum bagi warga masyarakat untuk menyampaikan usulan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.³ Tujuan utama dari musrenbang adalah untuk merencanakan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.⁴ Pada saat

² Marbun, *Proses Pembangunan Desa : Menyongsong Tahun 2000 Edisi Revisi* Jakarta: Erlangga, 2017, hal 55

³ Nandang Suherman, "Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa," ed. Nandang Suherman, 2nd ed. Jakarta: Inteligencia Media, 2019, 15.

⁴ Firmansyah Firmansyah et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 11–21, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>.

musrenbang berlangsung akan membukakan forum kepada masyarakat, yang dimana forum tersebut dapat memudahkan pemerintah desa dalam mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran sangat penting, baik untuk pemerintah desa maupun untuk masyarakat itu sendiri, karena dengan melibatkan masyarakat, pembangunan program desa akan lebih baik dan masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan tuntutannya.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin melakukan penelitian di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari media elektronik dimana di desa ini masih banyak terjadi pembangunan yang kurang maksimal. Salah satu pembangunan yang tidak terjadi secara maksimal yaitu adanya pembangunan sumur bor dengan sumber dana dari desa dan swadaya namun pembangunan itu tidak berfungsi semestinya.⁵ Selain itu, desa ini juga sedang mengalami permasalahan pembangunan sarana umum, termasuk gedung olahraga. Berdasarkan laporan yang menyebutkan bahwa proyek pembangunan tidak berjalan sesuai rencana, dengan pekerja yang kabur. Hal ini menciptakan keraguan di masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.⁶

⁵ “Pakai Anggaran Dana Desa Dan Swadaya Sumur Bor Di Desa Tanjung Lebar Terbengkalai,” 2024. Benua Jambi
<https://benuajambi.com/pakai-anggaran-dana-desa-dan-swadaya-sumur-bor-di-desa-tanjung-lebar-terbengkalai/>.

⁶ “Berawal Dari Laporan Pembangunan Gedung Sarana Olahraga Desa Tanjung Lebar Sungai Bahar Yang Diduga Bermasalah, Terkuak Cerita Lain,” topberita.co.id, 2024.
<https://topberita.co.id/berawal-dari-laporan-pembangunan-gedung-sarana-olahraga-desa-tanjung-lebar-sungai-bahar-yang-diduga-bermasalah-terkuak-cerita-lain/>

Berdasarkan riset awal yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa permasalahan pembangunan di dusun yang hingga kini belum dapat diselesaikan. Menurut pengakuan salah satu warga di dusun tanjung mandiri atau dusun lima, tiang listrik telah terpasang sejak 2015. Namun hingga kini, belum ada penjelasan untuk permasalahan listrik akan masuk ke dusun tersebut. Masyarakat di sana hanya memanfaatkan tenaga surya mengisi daya untuk panel agar dapat digunakan di malam hari.⁷ Pada tahun 2023 Desa Tanjung Lebar telah melaksanakan musyawarah rencana kerja pemerintah (RKPDDes) TA 2024 yang dimana musyawarah dibuka oleh Wakil Ketua BPD Desa Tanjung Lebar.⁸ Adapun hasil dari musyawarah RKPDes yang dilakukan di Desa Tanjung Lebar yang dibuka oleh wakil ketua BPD dapat dilihat ada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 APBDes 2023 Pelaksanaan Desa Tanjung Lebar

	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	Rp 1.864.999.000,00	Rp 1.210.122.035,00

Sumber: Website Desa Tanjung Lebar⁹

⁷ Achmad Wicaksana, “Tanjung Mandiri: Persoalan Yang Tak Pernah Dituntaskan,” amira.co.id, 2024.

<https://amira.co.id/tanjung-mandiri-persoalan-yang-tak-pernah-dituntaskan>

⁸ Vista Elenria, “Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah (Rkpddes) TA 2024,” Desa Tanjung Lebar.id, 2023, <https://tanjunglebar.desa.id/artikel/2023/8/2/musyawarah-rencana-kerja-pemerintah-rkpddes-ta-2024>.

⁹ “Transparansi Anggaran Desa Tanjung Mandiri,” website Desa Tanjung Lebar, <https://tanjunglebar.desa.id/>.

Tabel 1.2 APBDes 2023 Pendapatan Desa Tanjung Lebar

Sumber	Anggaran	Realisasi
Hasil Usaha Desa	Rp 45.000.000,00	Rp 12.625.645,00
Dana Desa	Rp 1.014.154.000,00	Rp 689.492.400,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 49.056.000,00	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 656.789.000,00	Rp 508.003.990,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,00	Rp,00

Sumber: Website Desa Tanjung Lebar¹⁰

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa adanya selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi anggaran, sebagaimana besarnya anggran pendapatan yang didapatkan yaitu sebesar 1,8 M rupiah namun pada realisasinya hanya sebesar 1,2 M rupiah dan besarnya selisih yang terlihat jelas yaitu 600 Juta rupiah. Lalu pada tabel 1.2 terlihat bahwa anggaran untuk hasil usaha desa sebesar 45 Juta rupiah namun pada realisasinya hanya sebesar 12 Juta rupiah terlihat selisih sebesar 32 Juta rupiah. Lalu anggaran pada dana desa sebesar 1 M rupiah namun pada realisasinya hanya sebesar 689 Juta rupiah terlihat selisih sebesar 325 Juta rupiah. Lalu untuk bagi hasil pajak dan retribusi terlihat anggaran sebesar 49 Juta rupiah namun tidak terlihat realisasi untuk anggaran ini. Lalu pada alokasi dana desa terlihat anggaran sebesar 657 Juta rupiah

¹⁰ Ibid.

namun pada realisasinya sebesar 508 Juta rupiah terlihat selisih sebesar 149 Juta rupiah. Kemudian pada bantuan keuangan kabupaten/kota terlihat anggaran sebesar 100 Juta rupiah, namun tidak terlihat realisasi untuk anggaran ini. Hal ini menunjukkan bahwa desa belum sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan.

Banyaknya permasalahan pembangunan yang muncul akibat pelaksanaan yang tidak tepat. Karena setiap desa menerima anggaran yang cukup besar, maka penting bagi masyarakat untuk memantau serta mengawasi pengelolaan dana tersebut. Dengan demikian, masyarakat diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan penganggaran untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Hak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan penganggaran dilindungi oleh UU 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 59 tahun 2007 tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang dana perimbangan pusat dan daerah.

Peneliti menggunakan tiga jurnal dalam penelitian ini sebagai acuan penelitian terdahulu dan sebagai panduan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian pertama milik Desman Jaya Gulo, Prietsaweny Riris T. Simamora, dan Rahel Sukatendel tentang pola komunikasi dalam pemenuhan aspirasi masyarakat digunakan sebagai model penelitian terdahulu¹¹. Berikutnya adalah penelitian kedua yang dilakukan di Desa Praibakul oleh Satrio Aryanto Hamonagan Matadou tentang keterlibatan

¹¹ D J Gulo, P R T Simamora, and ..., "Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat," *Ilmiah Ilmu Komunikasi* 6 (2022): 93–103.

masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa¹². Penelitian terakhir yang dilakukan studi kasus politik anggaran di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan oleh Peri Ilham, La Bilu, dan Muh. Nasir tentang penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa¹³.

Penelitian Desman Jaya Gulo, Prietsaweny Riris T Simamora, dan Rahel Sukatendel tentang pola komunikasi menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama dan komunikasi guna menyalurkan tujuan masyarakat dengan lebih baik. Hal ini hampir sama dengan penelitian milik Satrio Aryanto Hamonagan Matadou yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan dana desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana di dalam penelitiannya satrio mengatakan bahwa masyarakat memiliki partisipasi yang baik dalam musyawarah desa, di mana mereka aktif memberikan masukan terkait program pembangunan.

Pada penelitian milik Peri Ilham, La Bilu dan Muh.Nasir mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa sangat signifikan, di mana mereka dapat menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka. Pemerintah desa berperan aktif dalam menerima masukan dari masyarakat dan mengintegrasikan aspirasi tersebut ke dalam perencanaan dan pengelolaan dana. Meskipun terdapat

¹² Satrio Aryanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul," *The Journalish: Social and Government* 3, no. 4 (2022): 267–73.

¹³ Ilham, Bilu, dan Nasir, "Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Politik Anggaran Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan)." *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi* 2, no. April (2024): 38–48.

tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan intervensi politik, penelitian ini menggaris bawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di desa.

Terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam ketiga penelitian tersebut di atas, yang digunakan peneliti sebagai dasar perbandingan dengan penelitian yang perlu dilakukan. Penelitian Peri Ilham menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, penelitian Desman mengidentifikasi peran strategis pemerintah, dan penelitian Satrio lebih berfokus pada fungsi komunikasi. Namun, peneliti masih perlu meneliti bagaimana aspirasi masyarakat diserap ke dalam pengelolaan dana desa. Selain perbedaan tersebut ada juga perbedaan yang sangat mendasar yaitu objek penelitian, dimana pada penelitian pertama objek penelitiannya yaitu DPRD Kabupaten Nias, pada penelitian kedua objek penelitiannya yaitu di desa praibakul, lalu pada penelitian ketiga objek penelitiannya yaitu Desa Puosu Jaya sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu Desa Tanjung Lebar.

Pada yang akan dilakukan oleh peneliti, ingin melihat bagaimana Pemerintah Desa atau BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menyerap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat yang kemudian akan diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa. Penelitian ini sama dengan penelitian milik Peri Ilham, La Bilu dan Muh.Nasir yang dimana sama-sama ingin meneliti bagaimana pemerintah desa atau bpd dalam menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penyerapan Aspirasi

Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Tanjung Lebar,
Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Lebar?
2. Apa tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam penggunaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Lebar
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam penggunaan dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana desa, sehingga aspirasi mereka lebih terakomodasi serta penelitian dapat menjadi panduan

bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola dana desa secara lebih efektif, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

2. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berkontribusi pada keberhasilan pembangunan desa, serta memperkaya literatur tentang teori partisipasi dan Penelitian ini berpotensi untuk memperdalam pemahaman tentang interaksi antara aktor-aktor dalam sistem sosial desa, serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Konsep Aspirasi

Amirudin menyatakan bahwa konsep aspirasi memiliki dua definisi: aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Konsep di tingkat ide mengacu pada sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat mana pun. Di tingkat peran dalam struktur, ini berarti keterlibatan langsung dalam operasi pemerintah. Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung proses pembangunan. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai ide verbal, untuk mempengaruhi dan mendukung proses pembangunan.¹⁴

Ide mendasar di balik pelibatan masyarakat secara langsung adalah bahwa hanya ketika masyarakat itu sendiri berpartisipasi, apa yang disebut sebagai pelibatan kepentingan masyarakat dapat terjadi. Dengan sendirinya, pelibatan masyarakat memastikan prosedur yang baik dan tepat. Menurut tujuannya, masyarakat berfungsi sebagai tempat untuk pekerjaan dan usaha komersial, serta sebagai pemasok dan distributor barang dan jasa. Sosialisasi, keselamatan publik, tempat untuk saling membantu dan berkolaborasi, kontrol sosial, organisasi, dan keterlibatan politik.¹⁵ Berikut penjelasan yang lebih detail mengenai keterlibatan masyarakat yang sesuai dengan fungsinya:

1. Kebutuhan masyarakat seperti barang, jasa, atau layanan yang harus diberikan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Masyarakat akan merasa kurang sejahtera apabila ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi.
2. Keinginan masyarakat sebagai tambahan terhadap kebutuhan yang diinginkan, agar mereka merasa lebih puas. Namun, kesejahteraan tidak benar-benar berkurang jika keinginan tidak terpenuhi.

¹⁴ Michael G. H. Goni, Herman Nayoan, and Daud Liando, "Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2022): 1–8.

¹⁵ Ilham, Bilu, dan Nasir, Op.Cit, Hal 40-41

3. Aspirasi masyarakat adalah kumpulan gagasan dan ide yang merupakan kebutuhan masyarakat yang dibahas dalam forum formalitas dari lapisan masyarakat mana pun yang terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Kebutuhan masyarakat dapat berupa barang dan jasa, serta hal-hal lainnya yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan. Aspirasi masyarakat ini dituangkan dalam usulan kegiatan pembangunan desa.

1.5.2 Partisipasi Masyarakat

Keith Davis menjelaskan partisipasi sebagai keterlibatan seseorang dalam situasi kelompok, baik mental, kognitif, maupun emosi, yang mendorong seseorang untuk memberikan sumbangan kelompok untuk mencapai tujuan dan juga bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Partisipasi dalam masyarakat mengacu pada keterlibatan sukarela masyarakat dalam pengambilan keputusan, administrasi program, manfaat program, dan penilaian program untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah sering kali hanya mengakui dan menyertakan kelompok organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum (LSM/NGO) dalam hal pelembagaan keterlibatan. Akibatnya, organisasi masyarakat setempat dan/atau organisasi non hukum seperti perkumpulan petani, perkumpulan nelayan, organisasi kesenian setempat, organisasi pendidikan, organisasi keagamaan, dan perkumpulan masyarakat adat terpinggirkan dari proses pembuatan kebijakan, perencanaan,

penganggaran, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam serta aset negara/daerah.¹⁶

Area publik untuk keterlibatan umumnya lebih spontan saat ini karena berbagai wahana. Dengar pendapat publik di DPRD, pengaduan di kotak saran, dan lembaga desa formal lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa merupakan beberapa saluran utama yang sering digunakan sebagai media partisipasi. BPD merupakan organisasi yang menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki sistem komunikasi dua arah, yaitu masyarakat menyampaikan usulan kepada pemerintah desa dan pemerintah desa menawarkan berbagai kebijakan kepada masyarakat.¹⁷

Daya dorong merupakan kunci terwujudnya sistem manajemen pembangunan daerah terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat masyarakat adalah keterlibatan penuh para pelaku pembangunan daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Perencanaan pembangunan partisipatif dipandang sebagai pendekatan yang membantu para pelakunya memahami isu yang mereka hadapi, memeriksa penyebabnya, menciptakan solusi yang tepat sasaran, dan menawarkan kerangka kerja untuk melacak dan menilai pelaksanaan program.

¹⁶ Ibid. hal 15-16

¹⁷ Ibid. hal 25-43

Cohen dan Uphoff, memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif yang dijelaskan sebagai berikut.¹⁸

1. *Participation in decision making*

Participation in decision making mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Dengan menawarkan pemikiran dan rekomendasi untuk mengevaluasi program atau kebijakan yang akan dipilih, masyarakat berpartisipasi dalam proses pengembangan dan pengambilan keputusan.

2. *Participation in implementation*

Participation in implementation mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Uphoff, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dicapai dengan memberikan kontribusi sumber daya keuangan, material, dan energi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

3. *Participation in benefit*

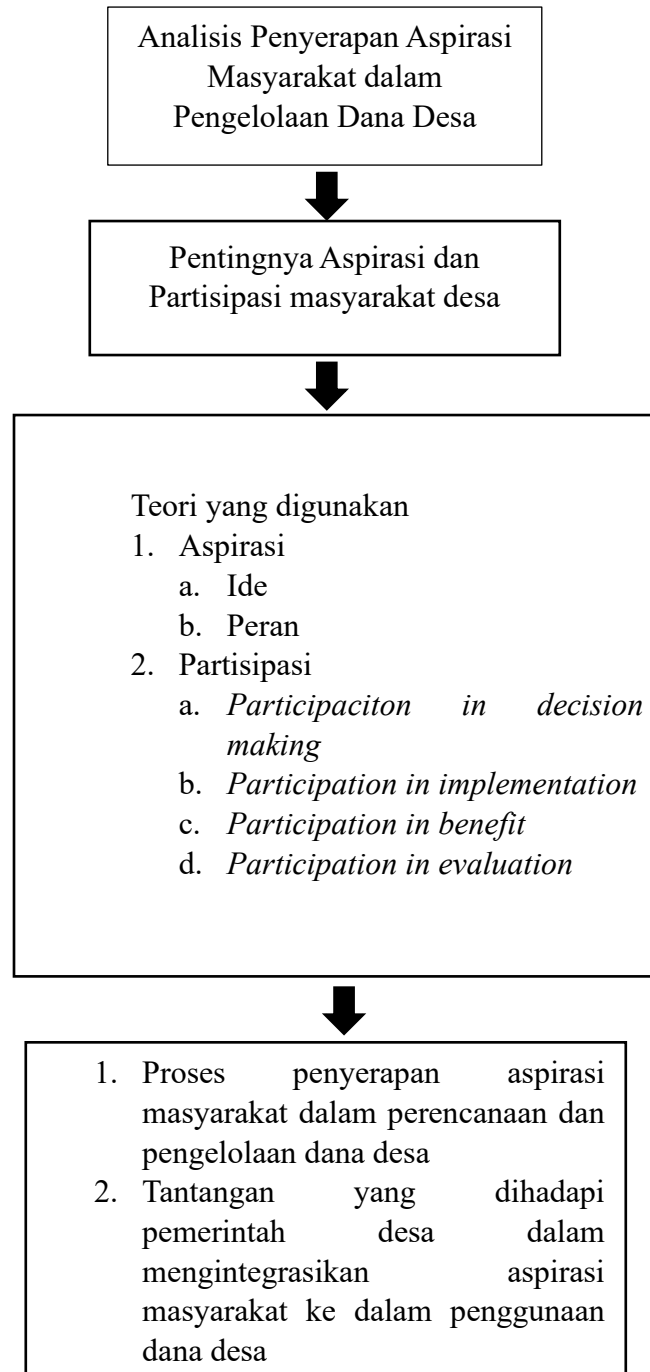
Participation in benefit adalah jenis posisi di mana keterlibatan dapat menghasilkan hasil yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah.

¹⁸ Ibid. hal 25-43

4. Participation in evaluation

Participation in evaluation mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam melacak dan mengevaluasi pelaksanaan hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan rekomendasi dan kritik tentang bagaimana pemerintah dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemerintah mengikuti rencana dan menghasilkan hasil yang diinginkan.

1.6 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Menurut Sugiyono deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan dan menjelaskan suatu permasalahan secara rinci.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang dimana peneliti akan mengamati keadaan dan melakukan interaksi yang dimana itu akan digunakan peneliti sebagai data untuk kemudian dianalisis agar bisa menarik suatu kesimpulan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis yang mendalam terkait topik yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu, lokasi penelitian dipilih di Desa Tanjung Lebar, yang terletak di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi serta kedekatannya dengan isu yang ingin diteliti, sehingga dapat memberikan data yang lebih akurat dan representatif dalam memahami permasalahan yang ada.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi lingkup penelitian, sehingga penelitian dapat terarah dan mencapai tujuan. Spradley dalam Sugiyono

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, ed. oleh Sugiyono, 27 ed. Bandung: Alfabeta, 2020, hal 30

menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*”, maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi sosial.²⁰ Sehingga penulis memfokuskan penelitian pada penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa tanjung lebar.

1.7.4 Sumber Data

1.7.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau responden melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi, atau eksperimen. Berikut ini adalah cara pengumpulan data primer:

- a. Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian awal untuk mengidentifikasi isu yang perlu diselidiki, namun juga ketika peneliti ingin menggali informasi lebih dalam dari para responden. Metode ini bergantung pada laporan pribadi atau setidaknya pada pengertian dan kepercayaan individu. Dalam proses wawancara, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengetahuan atau keyakinan dari orang yang diwawancarai.

²⁰ Ana Puji Astuti dan Luluk Hidayatul Z., “Fokus Dan Rumusan Masalah Penelitian Kualitatif,” Rijal akbar, 2021, <https://www.rijalakbar.id/2021/06/fokus-dan-rumusan-masalah-penelitian.html>.

- b. Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi, yang melibatkan pengamatan terhadap keadaan. Peneliti melakukan pengamatan langsung objek yang diteliti dari dekat dalam penelitian ini.

1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk memverifikasi data yang dipublikasikan sebelumnya atau untuk mendukung dan mengungkap kebenaran dari wawancara mendalam. Surat kabar dan situs web yang berkaitan dengan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa merupakan sumber data.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Orang-orang yang benar-benar memahami isu yang diteliti dikenal sebagai informan penelitian, dan mereka dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang keadaan dan keadaan latar belakang penelitian.

1. Kepala Desa Tanjung Lebar : Endang Lestari, S.E
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : Yulizanita, S.H
3. Masyarakat Desa Tanjung Lebar

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Endang Lestari, S.E	Kepala Desa
2	Yulizania, S.H	BPD
3	Ahmad Abdul Hak	Mayarakat
4	Muhidin Tamba	Mayarakat
5	Aisyah Putri	Mayarakat
6	Zaenab	Mayarakat
7	Op. Godam Tampubolon	Mayarakat

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder, yang meliputi:

1. Observasi

Menurut Nasution, dasar ilmu pengetahuan adalah observasi, yaitu kenyataan yang ditemukan melalui observasi.²¹ Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian adalah wawancara, terutama ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, metode ini sangat berguna ketika peneliti ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pandangan pribadi dan pengalaman responden.²²

Wawancara mengandalkan laporan dari responden itu sendiri, atau yang sering

²¹ Miksi Hardianto, Agus Zainal Rachmat, and Suardi Jasma, "Manajemen Pemberdayaan Bidang Ekonomi Di Masjid Baitul Atieq," *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 2 (2021): 126–32, <https://doi.org/10.33369/joll.4.2.126-132>.

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, *syakir Media Press*, 1 ed., vol. 11 Bandung: syakir Media Press, 2021, hal 65

disebut dengan *self-report*, yang mencerminkan pengetahuan dan keyakinan pribadi mereka.²³ Peneliti akan mempelajari informasi yang lebih rinci tentang pengetahuan atau keyakinan pribadi narasumber melalui wawancara.²⁴

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merujuk pada pengumpulan dan analisis catatan atau rekaman kejadian yang terjadi di masa lalu, yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya penting lainnya dari seseorang yang memiliki nilai informasi penting.²⁵ Dalam pendekatan penelitian kualitatif, studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data lain seperti wawancara dan observasi. Ketika hasil temuan didukung oleh dokumen, seperti gambar atau karya seni yang sudah ada sebelumnya, temuan tersebut akan lebih kuat dan kredibel.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip, catatan lapangan, dan materi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memungkinkan mereka mencapai hasil yang diinginkan. Dalam analisis, bekerja dengan data, mengaturnya, memecahnya menjadi bagian yang dapat dikontrol, mengkodekannya, mensintesisnya, dan mencari pola adalah semua

²³ Fiantika, et.al Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, ed.Fiantika, *PT. Global Eksekutif Teknologi*, 1 st ed. Padang Sumattera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, hal 88

²⁴ Sugiyono, Op.Cit hal 30

²⁵ Fiantika, Op. Cit hal 23

bagian dari proses tersebut. Penulis penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman, yang menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan terus menerus sampai data menjadi jenuh. Aktivitas yang terlibat dalam analisis data termasuk mengumpulkan, mengurangi, menampilkan, dan menghasilkan tampilan/verifikasi.²⁶ Aktivitas dalam analisis data, yaitu data collection, data reduction, data display, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah pertama dalam analisis data, di mana peneliti mengumpulkan informasi melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, atau studi dokumen.

2. Reduksi data

Teori dan tujuan akan menjadi panduan bagi peneliti saat mereka mereduksi data. Reduksi data memerlukan pemadatan, pemilihan, dan pemusatan pada elemen yang paling signifikan yaitu pencarian tren dan tema.

3. Penyajian data

Data dapat disajikan menggunakan *flowchart*, infografis, deskripsi singkat, dan korelasi antar kategori, di antara format lainnya. Visualisasi data akan memudahkan pemahaman mengenai situasi yang terjadi dan membantu merencanakan langkah selanjutnya yang tepat.

²⁶ Mathew B Miles, *Qualitative Data Analysis*, ed. Helen Salmon, 3rd ed. London: SAGE, 2014.

4. *Concluding drawing/Verification*

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaksi, atau dapat berbentuk deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya gelap atau kusam tetapi menjadi jelas setelah pemeriksaan.

1.7.8 Keabsahan Data/Tringulasi

Menggabungkan beberapa metode pengumpulan data dengan sumber data yang sudah ada sebelumnya dikenal sebagai triangulasi. Ketika peneliti menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data, mereka mengumpulkan data sekaligus memverifikasi validitas berbagai metode pengumpulan data. Selain itu, data yang dikumpulkan lebih komprehensif, andal, dan konsisten.²⁷ Akibatnya, ada tiga jenis triangulasi: sumber, teknik, dan waktu.

1. Tringulasi Sumber

Metode untuk mengevaluasi data dari berbagai sumber atau informan untuk meningkatkan keandalan data disebut triangulasi sumber. Membandingkan dan memeriksa ulang tingkat keandalan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber dikenal sebagai triangulasi sumber.

²⁷ Fiantika, Op. Cit hal 61

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah proses pengumpulan data dari sumber yang sama menggunakan beberapa teknik pengumpulan data..

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data menggunakan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Teknik ini dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian data.